



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025-2029**



KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 050 / 21 / KEP/DPPPAKB/V/2026

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 63);

12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 – 2029 serta menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Mei 2026

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG,



Drs. AGUSTU AFENDI., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan, maupun partisipasinya dalam penyelesaian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang tahun 2025 - 2029 ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan sebagai salah satu pelaku pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.

Melalui kesempatan ini saya mengajak kepada semua pegawai, untuk saling bekerja sama dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan pembangunan di Kota Pangkal Pinang.

Pangkalpinang, 12 Mei 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
 BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	56
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	63
 BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	68
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	108
 BAB V : PENUTUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3 Aset Tanah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	22
Tabel 2.4 Gedung Bangunan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.....	23
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.....	29
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023.....	34
Tabel 2.7 Capaian Indikator lain yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	40
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	41
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.....	49
Tabel 2.10 Isu Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang	53
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	59
Tabel 3.2 Tahapan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.....	65
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.....	67
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	69
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2029	81
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang...	88
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang.....	110
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah.....	112

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.....	113
Tabel 4.7 Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Pangkal Pinang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

26. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Pangkal Pinang Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta lokus. Selain itu juga memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci, yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

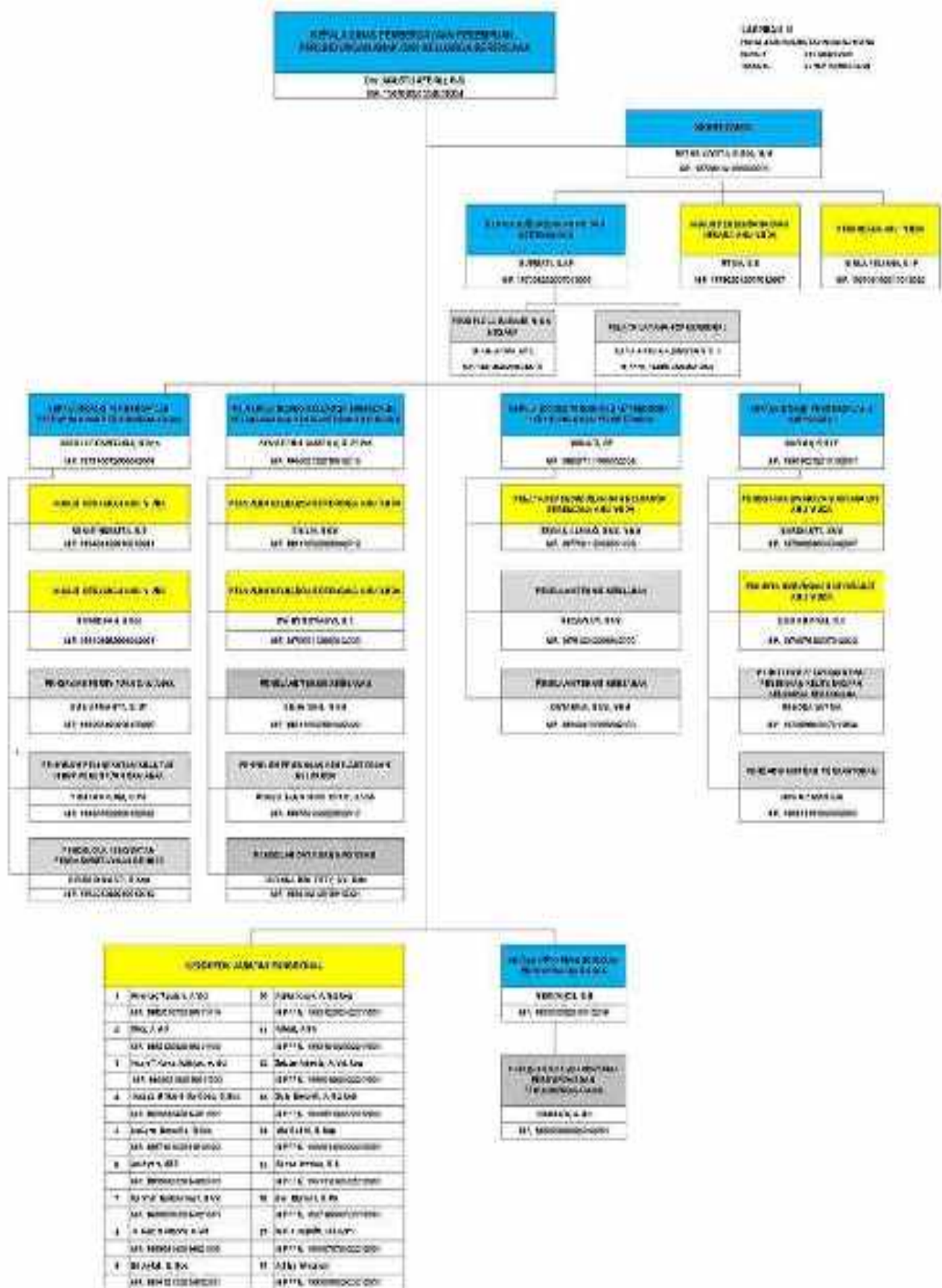
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. Penetapan Rencana Strategis dinas untuk mendukung Visi dan Misi Kota Pangkal Pinang dan Kebijakan Wali Kota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkal Pinang bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;

- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana, dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang



c. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan

- 5) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, koordinasi pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- 2) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- 3) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan anak;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang dan tugasnya;
- 2) Perumusan kebijakan daerah dalam penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;

- 3) Perumusan kebijakan daerah tentang fasilitasi pelaksanaan kelembagaan masyarakat, motivasi dan keswadayaan masyarakat;
- 4) Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan gerakan PKK, pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 7) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Teknologi Tepat Guna;
- 8) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas pendataan dan pendayagunaan profil kelurahan;
- 9) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- 10) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Pangkal Pinang.

Dalam melaksanakan tugasnya Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota;
- 4) Pelaksanaan pelayanan KB di kota;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

- 8) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kota;
- 9) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 10) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 58 (lima puluh delapan) pegawai dengan komposisi 28 (Dua Puluh Delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebesar 48,28%, 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau sebesar 1,72%, 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu atau sebesar 36,21% dan 8 (empat) orang Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) atau sebesar 13,79%.

Adapun jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD			1		1
1	SMP Sederajat			1		1
2	SMA Sederajat	1		7	3	11
3	D3		4		4	8
4	S1		18	7	7	32
5	S2	2	3			5
6	S3					
JUMLAH		3	25	16	14	58

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Mei 2026

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II		1	1
2	Golongan III	1	20	21
3	Golongan IV	2	4	6
JUMLAH		3	25	28

Sumber Data : Subbag.Umum dan Kepegawaian Mei 2026

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sarana dan prasarana yang tersedia di pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Aset Tanah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Ket
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1134 M ²	2006	Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pakai	16/11/ 2017	00043	Sebidang Tanah dipergunakan untuk Kantor DPPPAKB Kota Pangkal Pinang	Hibah	448.000 .000,00	

Tabel 2.4

Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Girimaya)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	138,25 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2012	623.037.432,45
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Gabek)	B		Jl. Jend Sudirman Gg. Gabus I Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek	123,40 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2016	698.125.009,37
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Pangkal Balam)	B		Jl. Yos Sudarso Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam	127,5 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2016	560.917.600,31
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Gerunggang)	B		Jl. Letkol Saleh Ode Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang	650 M ² (2 Lantai)	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2018	762.991.504,14
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Rangkui)	B		Jalan Duren III RT.4/RW.2 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui	127,5 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2019	608.715.306,61

6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Balai Penyuluh KB Kecamatan Taman Sari)	B		Jl. Sanggul Dewa Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari	129,54 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2020	480.946.274,73
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor UPTD PPA)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	93 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2022	242.814.000,00
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	179,50 M ²		Pembelian Tahun 2006	50.559.804,52
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kapitalisasi Gedung Utama)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	303,80 M ²		Pembelian Tahun 2006	245.093.310,00
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Perkerasan)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	387,45 M ²		Pembelian Tahun 2007	18.952.570,00
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Halaman Bangunan Pagar)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	25,50 M ²		Pembelian Tahun 2007	18.878.160,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Pagar)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	14,4 M ²		Pembelian Tahun 2007	13.574.848,00

13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Pagar)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	14,4 M ²		Pembelian Tahun 2007	13.574.848,00
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Gedung)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	48,3 M ²		Pembelian Tahun 2008	77.096.646,61
15	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Tanam)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	28,6 M ²		Pembelian tahun 2008	38.700.000,00
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Kapitalisasi Gedung Utama)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	37,95 M ²		Pembelian Tahun 2006	97.820.000,00
17	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Alokon)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	412,70 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2011	345.893.555,00
18	Bangunan Posyandu (Balai Penyuluh KB Kecamatan Bukit Intan)	B		Jl. Depati Hamzah RT.05/RW.02 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan	129,54 M ²	Hak Pakai	Pembelian Tahun 2019	616.894.493,39
19	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Bangunan Perluasan Gedung)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	47,89 M ²		Pembelian Tahun 2012	190.645.000,00

20	Gedung Garasi/Pool Permanen (Pengadaan Bangunan Gedung Kantor)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	51,05 M ²		Pembelian Tahun 2019	193.821.000,00
21	Gedung Garasi/Pool Permanen (Pembangunan Garasi Mobil Kantor)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	64,95 M ²		Pembelian Tahun 2019	40.732.000,00
22	Lain-lain Gedung Garasi	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	32,02 M ²		Pembelian Tahun 2023	22.263.048,87
23	Gedung Garasi Lain - Lain	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	27 M ²		Pembelian Tahun 2006	6.945.120,00
24	Gedung Garasi Lain – Lain (Kapitalisasi Parkir Mobil)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	32,02 M ²		Pembelian Tahun 2006	16.716.000,00
25	Selasar (Kanopi)	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	66,42 M ²		Pembelian Tahun 2015	34.025.000,00
26	Bangunan Ruang Kelas	B		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	T = 3M, L = 6M		Pembelian Tahun 2014	12.000.000,00

27	Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja (Bangunan Pagar)	KB		Jl. Rasakunda Gg Delima Siam VI Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya	25,50 M ²		Pembelian Tahun 2007	4.024.832,00
----	---	----	--	--	----------------------	--	-------------------------	--------------

Berdasarkan tabel 2.4 di atas terdapat 2 (dua) kondisi bangunan sebagai berikut :

1. Gedung/Bangunan dalam kondisi baik sebanyak 17 Bangunan

Untuk gedung/bangunan dalam kondisi baik, dibutuhkan biaya pemeliharaan setiap tahunannya sehingga kondisi bangunan tetap dalam keadaan baik.

2. Gedung/Bangunan dalam kondisi kurang baik sebanyak 10 Bangunan

Untuk gedung/bangunan dalam kondisi tidak baik, dibutuhkan biaya untuk rehabilitasi sehingga kondisi bangunan dapat menjadi baik.

Gedung/Bangunan yang perlu di lakukan rehabilitasi antara lain :

- 1) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Perkerasan)
- 2) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Halaman Bangunan Pagar)
- 3) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Pagar)
- 4) Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Bangunan Tanam)
- 5) Gedung Garasi/Pool Permanen
- 6) Gedung Garasi Lainnya

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan

No	URAIAN	JUMLAH BARANG	JUMLAH KEADAAN SEKARANG			SATUAN	KET
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT		
1	Kendaraan Roda 4	6	6			Unit	
2	Kendaraan Roda 2	4	4			Unit	
3	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1			1	Unit	
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	4			4	Unit	
5	Mesin Fotocopy Folio	1			1	Unit	
6	Lemari Besi/Metal	4	4			Unit	
7	Lemari Kayu	3	2		1	Unit	
8	Rak Besi	8	6	2		Unit	
9	Rak Kayu	15	13		2	Unit	
10	Filing Cabinet Besi	13	13			Unit	
11	Lemari Kaca	4	4			Unit	
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	1	1			Unit	
13	White Board	1	1			Unit	
14	LCD Projector/Infocus	7				Unit	
15	Papan Nama Instansi	2	2			Unit	
16	Papan Tulis	3	3			Unit	
17	Teralis	7	6		1	Unit	
18	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	18	18			Unit	
19	Meja Kerja Kayu	52	43		9	Unit	
20	Kursi Besi/Metal	50	50			Unit	
21	Meja Rapat	14	13		1	Unit	
22	Meja 1/2 Biro	42	40		2	Unit	
23	Kursi Rapat	231	231			Unit	

24	Kursi Tamu	1	1			Unit	
25	Kursi Biasa	7	7			Unit	
26	Bangku Tunggu	3	3			Unit	
27	Sofa	4	4			Unit	
28	Filling Besi/Metal	9	9			Unit	
29	Kursi Plastik	6	6			Unit	
30	Meubilair Lain-Lain	2	2			Unit	
31	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1			Unit	
32	Lemari Es	3	2		1	Unit	
33	A.C. Window	12	11		1	Unit	
34	A.C. Split	28	28			Unit	
35	Kipas Angin	9	8	1		Unit	
36	Exhause Fan	12	12			Unit	
37	Alat Pendingin Lain-Lain	3	3			Unit	
38	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	2			Unit	
39	Alat Dapur Lain-Lain	2	1		1	Unit	
40	Sound System	1	1			Unit	
41	Tangga Aluminium	1	1			Unit	
42	Dispenser	8	8			Unit	
43	Gordyin/Kray	25	25			Meter	
44	Rak Sampah	7	7			Unit	
45	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1	1			Unit	
46	Alat Pemadam/Portable	1	1			Unit	
47	Alat Pembantu Kebakaran	2	2			Unit	
48	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1			Unit	
49	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5			Unit	
50	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	3	3			Unit	

51	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota	106	88		18	Unit	
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			Unit	
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	6			Unit	
54	Kursi Kerja	3	3			Unit	
55	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	2			Unit	
56	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	6			Unit	
57	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-Lain	6	6			Unit	
58	Microphone/Wireless MIC	11		6	5	Unit	
59	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	11		6	Unit	
60	Layar Proyektor	1	1			Unit	
61	Camera Electronic	2			2	Unit	
62	Layar Film/Projector	5	5			Unit	
63	LCD Monitor	3	2		1	Unit	
64	Alat Studio Lain-lain	2	2			Unit	
65	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain	7		4	3	Unit	
66	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lain-lain	2			2	Unit	
67	Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	7	7			Unit	
68	P.C Unit	42	33	2	7	Unit	
69	Lap Top	13	8	3	2	Unit	
70	Personal Komputer Lain-Lain	1	1			Unit	
71	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1			Unit	
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	31	3	4	Unit	
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2			Unit	
74	External/ Portable Hardisk	2	2			Unit	

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, ada beberapa sarana dan prasarana penunjang kegiatan dalam kondisi Kurang Baik dan Rusak Berat dan perlu pengadaan antara lain :

1. Meja kerja kayu
2. Meja rapat
3. Meja $\frac{1}{2}$ biro
4. Lemari kayu
5. Rak besi
6. Rak kayu
7. Teralis
8. Lemari Es
9. Ac. Window
10. Kursi kerja
11. Wireles
12. Uninterruptible Power Supply (UPS)
13. PC unit
14. Laptop
15. Printer
16. Alat rumah tangga lainnya

2.1.3. Kinerja Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

a. Capaian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Tingkat capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang
Kota Pangkal Pinang Tahun 2021-2023**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	IDG	Indeks					57,96	58,23	58,49			61,19	61,60	65,10			105,57	105,79	111,30	
	Persentase Perempuan Sebagai Profesional, Teknis dan Manajerial (Non Pemerintah)	%				-	55,06	56,06	57,06	-	-	55,72	60,87	56,14	-	-	101,19	108,58	98,38	-
	Rasio Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO	%				-	0,033	0,029	0,026	-	-	0,031	0,053	0,063	-	-	106,06	<50	<50	-
	Indeks Pembangunan Keluarga	%				-	55	57	59	-	-	56,89	56,89	61,05	-	-	103,43	99,80	103,47	-
	Rasio Perempuan yang Duduk Dalam Jabatan Struktural (JPT, Administrator dan Pengawas di lingkup pemda)	%				-	43,86	44,63	45,40	-	-	46,20	45,11	42,88	-	-	105,33	101,07	94,44	-
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%				-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	%				-	100	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%				-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%				-	100	100	100	-	-	98,51	100	100	-	-	98,51	100	100	-
	Persentase ARG pada belanja langsung	%				-	0,82	0,85	0,88	-	-	2,37	3,84	2,4	-	-	289,02	451,76	272,72	-
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%				-	0,029	0,028	0,026	-	-	0,034	0,066	0,080	-	-	82,76	<50	<50	-
	Persentase Kader yang aktif melaksanakan KIE kepada masyarakat	%				-	100	100	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%				-	11	12	13	-	-	-	-	6,89	-	-	-	-	53	-
	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	%				-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	%				-	0,060	0,055	0,050	-	-	0,060	0,16	-	-	-	100	<50		-
	TFR (Total Fertility Rate)	Rata-Rata Anak per Wanita				-	2	1,9	1,65	-	-	2	1,98	2,26	-	-	100	95,79	63,03	-
	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin	%				-	80	81	82	-	-	77,94	98,14	66,82	-	-	97,42	121,16	81,48	-
	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%				-	79,74	79,84	79,94	-	-	77,94	98,14	66,02	-	-	97,74	122,92	82,58	-
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS				-	8,23	8,20	8,17	-	-	8,26	8,20	15,55	-	-	99,64	100	<50	-
	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	%				-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%				-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2025

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks				61,29	61,39				65,48	-				106,83	-			
	Persentase Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan	%				20	22				33,23	37,71				166,15	171,41			
	Persentase ARG Perangkat Daerah pada APBD	%				2,40	2,43				2,26	3,5				94,16	144,03			
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	%				36	40				48,57	54,28				134,92	135,7			
	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%				0,014	0,013				0,066	0,048				<50	<50			
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Rasio				14,35	13,46				65,83	48,77				<50	<50			
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat				701-800 (Nin-dya)	701-800 (Nin-dya)				Tidak ada penilai an	501 (Prata-ma)				-	71,47			
	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	%				30	34				30	34				100	100			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%				0,41	0,39				0,044	0,055				100	100			
	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks				56,93	56,97				61,86	73,5				108,66	129,02			
	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS Usia 15-49 tahun	Rata-Rata Anak per Wanita				2	2				2,25	2,18				87,5	91			
	Persentase Tersedianya Data Keluarga dan KB di Kelurahan	%				100	100				100	100				100	100			
	Angka Kelahiran (Remaja Perempuan Umur 15-19 Tahun) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS				8,23	8,20				20,70	27,4				<50	<50			
	Cakupan PKB/ PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian	%				100	100				100	100				100	100			
	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate (MCPR)	%				78,00	78,20				71,34	60,5				91,46	77,37			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%				7,62	7,58				5,37	16,4				100	<50	-	-	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%				83,72	83,74				55,7	47				66,53	56,13			
	Cakupan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	%				100	100				100	100				100	100			
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	%				66,66	69,04				88,00	90,47				132,01	131,04			

Persentase Kelurahan Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Baik	%				100	100				100	100				100	100			
Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	%				100	100				100	100				100	100			
Persentase Kelurahan dengan Kinerja Baik	%				100	100				100	100				100	100			
Persentase LKK Aktif	%				100	100				100	100				100	100			
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai				67	69				74,30	72,25				110,90	104,71			
Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai				85	90				89,74	92,11				105,58	102,34			

Tabel 2.7

Capaian Indikator lain yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,242	0,209	0,238	0,217	0,211	
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46,36	49,65	50,81	53,75	52,73	
3.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	-	69,33	67,62		
4.	Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting	%	-	-	-	33,71	-2,86	0,13

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun
2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.613.660	-	-	-	-	49.371.720	-	-	-	-	80,13	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	117.884.700	-	-	-	-	113.699.700	-	-	-	-	98,45	-	-	-	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	573.180.000	-	-	-	-	434.491.476	-	-	-	-	75,80	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	524.200.000	-	-	-	-	448.993.524	-	-	-	-	85,65	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Program Keluarga Berencana	2.212.229.505	-	-	-	-	1.938.133.298	-	-	-	-	87,61	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	4.021.103.050	4.431.184.467	4.621.674.894	4.822.533.114	-	3.884.984.168	4.288.122.056	4.494.878.125	4.541.277.195	-	96,61	96,77	97,26	94,17	0,04	0,01

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Program Pengendalian Penduduk	-	25.675.000	95.395.000	155.400.000	204.220.000	-	12.606.500	85.929.300	151.882.510	199.872.060	-	49,10	97,08	97,74	97,87	0,31	0,31
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	2.942.092.400	2.368.595.000	2.524.692.544	4.989.011.688	-	2.450.566.671	2.109.250.155	2.413.809.969	4.870.061.664	-	83,29	89,05	95,61	97,61	0,98	1,02
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	471.720.350	2.123.237.200	3.697.816.784	1.280.766.000	-	467.315.650	1.713.828.800	3.249.238.594	1.274.243.400	-	99,07	80,72	87,87	99,49	-0,65	-0,61
Program Perlindungan Perempuan	-	460.290.200	521.390.800	141.669.796	338.057.850	-	98.731.600	314.011.500	96.002.996	241.838.900	-	21,45	60,22	67,76	71,54	1,39	1,52
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	210.420.000	-	-	-	-	210.420.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	308.200.000	402.933.800	184.882.500	-	-	298.200.000	358.201.490	176.791.970	-	-	96,75	88,89	95,62	-0,54	-0,51
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-	26.205.500	-	-	-	-	23.755.000	-	-	-	-	90,65	-	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	38.548.400	137.771.916	72.059.096	-	-	38.150.000	125.288.696	63.739.196	-	-	98,97	90,94	88,45	-0,47	-0,49
Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	102.306.000	-	284.670.250	-	-	100.966.000	-	177.198.500	-	-	98,69	-	62,25	1,78	0,75

Program Administrasi Pemerintah Desa	-	-	-	-	42.610.000	-	-	-	-	42.610.000	-	-	-	-	100	-	-
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	383.760.000	-	1.059.999. 134	-	-	383.760.000	-	1.050.616. 026	-	-	100	-	99, 11	1,76	1,74

c. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari penyelenggaraan layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Penetapan kelompok sasaran ini sangat penting untuk memastikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kelompok sasaran layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Umum;
2. Lembaga Pendidikan;
3. Perangkat Daerah;
4. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
5. Media dan Dunia Usaha;
6. Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana;
7. Tenaga Lini Lapangan;
8. Kader PPKBD dan Sub PPKBD;
9. Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R, dan Kelompok UPPKA);
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu).

d. Penghargaan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu Tahun 2020-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menerima penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kabupaten/ Kota tercepat Dalam Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Tersusunnya Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 Aspek Tahun 2020.
3. Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik III Kategori Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mendukung Program Bangga Kencana Tahun 2021.
4. Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik 2 Realisasi Perjanjian Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2021.
5. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik I realisasi Pernjanjian Kinerja Program Bangga Kencana Tahun 2023.
6. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik I Kabupaten/ Kota dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96,80% dalam Pelaksanaan DAK BOKB TA 2023.
7. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kategori Kabupaten/Kota dengan Pemanfaatan Data Hasil Pendataan Keluarga Terbaik Tahun 2024.

8. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik I Kabupaten/Kota dengan Capaian Realisasi BOKB Tahun 2024.
9. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Pencapaian Peserta KB Baru MKJP Terbaik Dalam Rangka Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tahun 2024.
10. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik I Capaian Hasil Pelayanan KB MKJP Pada Pelayanan Serentak Sejuta Akseptor Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
11. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Kep. Bangka Belitung Kategori Kabupaten/Kota dengan Dukungan Manajemen Data Siga Terbaik.
12. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik I Capaian Peserta KB Vaksektomi Terbanyak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
13. Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Terbaik II Capaian Pelayanan Peserta Baru (PB) KB Pada Pelayanan KB Sejuta Akseptor Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025.
14. Penghargaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Kategori Pelayanan KB MOP Terbaik Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Belum Optimalnya Peningkatan Kesetaraan Gender,
2. Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Perempuan
3. Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Anak.
4. Belum Optimalnya Penurunan Angka Total Fertility Rate.
5. Masih Rendahnya Upaya untuk Memberdayakan Keluarga Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera.
6. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan serta penguatan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.9

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkal Pinang**

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Peningkatan Kesetaraan Gender IDG Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 = 61,84 Tahun 2021 = 61,19 Tahun 2022 = 61,60 Tahun 2023 = 65,10 Tahun 2024 = 65,48	Belum optimalnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Terbatasnya Akses Perempuan terhadap Sumber Daya dan Keterwakilan yang Rendah dalam Pengambilan Keputusan	Masih kurangnya partisipasi dari lintas sektor (Swasta, Masyarakat, Instansi Terkait) dalam Pencapaian Pengarusutamaan Gender
Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Perempuan Jumlah Korban Kekerasan : Tahun 2020 = 19 Orang Tahun 2021 = 17 Orang Tahun 2022 = 32 Orang Tahun 2023 = 50 Orang Tahun 2024 = 78 Orang	Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki	Kombinasi dari Faktor Sosial, Ekonomi, Psikologis dan Teknologi	Belum optimalnya peran lintas sektor terkait pencegahan kekerasan terhadap Perempuan
Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Anak Jumlah Korban Kekerasan : Tahun 2020 = 21 Orang Tahun 2021 = 30 Orang Tahun 2022 = 40 Orang Tahun 2023 = 38 Orang Tahun 2024 = 36 Orang	Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki	Kombinasi dari Faktor Sosial, Ekonomi, Psikologis dan Teknologi	Belum optimalnya peran lintas sektor terkait pencegahan kekerasan terhadap anak

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Penurunan Angka Total Fertility Rate TFR Kota Pangkal Pinang: Tahun 2021 = 2 Rata-Rata Anak per Wanita Tahun 2022 = 1,98 Rata-Rata Anak per Wanita Tahun 2023 = 2,26 Rata-Rata Anak per Wanita Tahun 2024 = 2,25 Rata-Rata Anak per Wanita	Banyak Pasangan Usia Subur yang Tidak Ikut ber-KB	Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi Sehingga Masih Banyak Pernikahan di Bawah Umur	Pola Pikir Masyarakat terhadap KB yang erat dengan Adat, Budaya serta Agama
Masih Rendahnya Upaya untuk Memberdayakan Keluarga Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan : Tahun 2021 = 0 % Tahun 2022 = 6,3% Tahun 2023 = 17,21% Tahun 2024 = 21,56 %	Rendahnya Inisiatif dan Keterlibatan Aktif Masyarakat/ Keluarga dalam Kegiatan Pemberdayaan Keluarga	Anggota Keluarga Kurang Memahami Tujuan Pemberdayaan Keluarga	Rendahnya Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga serta terbatasnya terhadap akses informasi

Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah LKK Kota Pangkal Pinang sebanyak 1. Rukun Warga (RW) = 114 2. Rukun Tetangga (RT) = 355 3. PKK = 469 4. Posyandu = 119 5. LPM = 42 6. Karang Taruna = 42	Terbatasnya SDM yang memiliki Kapasitas, kompetensi dan Pengetahuan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat		Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan serta penguatan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi dari lintas sektor (Swasta, Masyarakat, Instansi Terkait) dalam Pencapaian Pengarusutamaan Gender.
2. Belum optimalnya peran lintas sektor terkait pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
3. Pola Pikir Masyarakat terhadap KB yang Erat dengan Adat, Budaya serta Agama.

4. Rendahnya Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga serta terbatasnya terhadap akses informasi terkait Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan serta penguatan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.2.1. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telaahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 12 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkal Pinang Tahun 2011-2030 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Peningkatan Kesetaraan Gender.
2. Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Belum Optimalnya Penurunan Angka Total Fertility Rate.

4. Masih Rendahnya Upaya untuk Memberdayakan Keluarga Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera.
5. Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tabel 2.10

Isu Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Peluang besar untuk memperkuat kolaborasi pusat-provinsi-daerah karena status kota inti pelayanan	1. Belum optimalnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Lemahnya kelembagaan, penegakan dan kesadaran hukum oleh masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan modal manusia	-Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya Peningkatan Kesenjangan Gender
	2. Terbatasnya Akses Perempuan terhadap Sumber Daya dan Keterwakilan yang Rendah dalam Pengambilan Keputusan				-Penguatan kualitas sumber daya manusia	
	3. Belum Optimalnya Upaya Pencegahan Kekerasan pada Lintas Sektor	Lemahnya kelembagaan, penegakan dan kesadaran hukum oleh masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan modal manusia	-Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia -Penguatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	4. Banyak Pasangan Usia Subur yang Tidak Ikut ber-KB 5. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi Sehingga Masih Banyak Pernikahan di Bawah Umur	Lemahnya kelembagaan, penegakan dan kesadaran hukum oleh masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan modal manusia	-Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia -Penguatan kualitas sumber daya manusia	Belum Optimalnya Penurunan Angka Total Fertility Rate
2. Stabilitas sosial dan ekonomi mendukung terciptanya berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan	1. Rendahnya Inisiatif dan Keterlibatan Aktif Masyarakat/ Keluarga dalam Kegiatan Pemberdayaan Keluarga		Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan modal manusia	-Pengentasan Kemiskinan -Peningkatan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan berkeadilan	Masih Rendahnya Upaya untuk Memberdayakan Keluarga Guna Mewujudkan Keluarga Sejahtera

	2.Terbatasnya SDM yang memiliki Kapasitas, kompetensi dan Pengetahuan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Lemahnya kelembagaan, penegakan dan kesadaran hukum oleh masyarakat	Geopolitik dan Geoekonomi	Potensi Sumber Daya Manusia dan modal manusia	-Pengentasan Kemiskinan -Peningkatan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan berkeadilan	Belum Optimalnya Peran Kelembagaan Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
--	---	---	---------------------------	---	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kota Pangkal Pinang berpedoman pada visi dan misi Wali Kota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkal Pinang tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu kepala Daerah dalam mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Keluarga dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dan Penegakan Integritas”

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Indikator Tujuan 1 : Indeks Ketimpangan Gender

Indikator Tujuan 2 : Indeks Perlindungan Anak

Indikator Tujuan 3 : Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)

Indikator Tujuan 4 : Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko
Indeks (MRI) Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Partisipasi Pembangunan

Indikator 1 : Indeks Pembangunan gender (IDG)

Indikator 2 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator 3 : Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

2. Sasaran 2 : Terpenuhinya Upaya perlindungan dan penjaminan hak anak

Indikator 1 : Predikat Kota Layak Anak

3. Sasaran 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Pengendalian Jumlah Penduduk

Indikator 1 : Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)

Indikator 2 : Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting

Indikator 3 : Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera

4. Sasaran 4 : Terlaksananya Implementasi Kebijakan SPIP secara Terintegrasi, Komprehensif dan Sistematis.

Indikator 1: Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan RPJMD 1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata			Tingkat Kemiskinan	Persen	4,5* (Rendah)	3,10 – 4,00 (Rendah)	2,90 – 3,80 (Rendah)	2,70 – 3,70 (Rendah)	2,14– 3,47 (Rendah)	2,10 – 3,30 (Rendah)	
Sasaran RPJMD 1 Meningkatnya Peran Serta dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan			Indeks Pembangunan Gender	Indeks/ Nilai	95,29*	95,49	95,69	95,89	97,1	97,35	
	Tujuan Dinas Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Keluarga dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dan Penegakan Integritas		Indikator Tujuan 1 Indeks ketimpangan gender	Indeks/ Poin	0,229*	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	

		Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan	Indikator Sasaran 1 Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	65,50	65,60	65,72	65,84	65,96	66,08	
			Indikator Sasaran 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	
			Indikator Sasaran 3 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	0,048*	0,046	0,045	0,043	0,041	0,039	
			Indikator Tujuan 2 Indeks perlindungan anak	Indeks	67,70	67,75	67,80	67,85	67,90	67,95	
		Sasaran 2 Terpenuhinya upaya perlindungan dan penjaminan hak anak	Indikator Sasaran 1 Predikat Kota Layak Anak	Predikat	501* (Pratama)	550 (Pratama)	600 (Pratama)	610 (Madya)	620 (Madya)	640 (Madya)	
			Indikator Tujuan 3 Indeks pembangunan keluarga	Indeks/ Poin	73,5*	74	74,5	75	75,5	76	
		Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk	Indikator Sasaran 1 Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49 tahun)	Rata-rata anak per Wani-ta	2,18*	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	

			Indikator Sasaran 2 Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting	Persen	0,13*	2	2	2	2	2	
			Indikator Sasaran 3 Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100*	100	100	100	100	100	
Tujuan RPJMD 2 Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan melayani			Indikator Tujuan 1 Reformasi Birokrasi Indeks	Nilai	77,23*	77,52	78,21	78,35	79,1	79,25	
Sasaran RPJMD 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Pemerintah Daerah			Indikator Sasaran 1 Capaian Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level	2* (Terkelola)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	3 Terdefinisi	3 Terdefinisi	
	Tujuan Dinas Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Keluarga dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dan Penegakan Integritas		Indikator Tujuan 4 Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah	Level	3*	3	3	3	3	3	

		Sasaran 4 Terlaksananya Implementasi Kebijakan SPIP secara Terintegrasi, Komprehensif dan Sistematis	Indikator Sasaran 1 Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	Persen	100*	100	100	100	100	100	
--	--	--	---	--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	--

Note: *Realisasi 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tahapan Strategi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2026-2030

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial ; Melakukan Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan kapasitas kelurahan/ lembaga serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan; Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima; Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana; anak dan keluarga	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial ; Melakukan Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan kapasitas kelurahan serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan; Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima; Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana; anak dan keluarga	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial ; Melakukan Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan kapasitas kelurahan serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan; Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima; Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana; anak dan keluarga	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial ; Melakukan Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan kapasitas kelurahan serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan; Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima; Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana; anak dan keluarga	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial ; Melakukan Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan kapasitas kelurahan serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan; Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak; Meningkatkan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima; Meningkatkan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga,kependudukan dan keluarga berencana; anak dan keluarga

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.3

**Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Tahun 2025-2029**

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1.	Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial	Peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender	
			Peningkatan kualitas SDM perlindungan perempuan dan anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima	
			Peningkatan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak-hak anak	
			Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	
			Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
			Peningkatan kapasitas kelurahan/lembaga serta pemberdayaan masyarakat pada setiap kelurahan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Dalam tahapannya, Perangkat Daerah perlu menyusun cascading kinerja untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut:

TABEL 4.1
TERRAK MERUMUSKAN PROGRAM KEGIATAN SUB KE SATUAN PERSAWHAT DASAR

Indikator Keberhasilan (IKS) yang Ditentukan	Tujuan Utama (TU) (MPO)	Subsumber (Subs) (MPO)	METODE	INDIKATOR	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Ditentukan	Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pemangku
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan IK/MO 1 Meningkatnya Kesepuhan Masyarakat yang AKI dan AKI					INDIKATOR KE MENDIRIAN		KETUA DASAR
Subsumber IK/MO 1 Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan					INDIKATOR PERBANGUNAN GENDER		KETUA DASAR
Tujuan Utama Meningkatnya Kesepuhan Gender, Pendidikan Anak, Kualitas Keluarga dan Masyarakat Pembangunan Masyarakat yang Menerapkan 3 Mitra Menerapkan Terdapat Peningkatan Pembangunan dan Peningkatan Interaksi					Indikator Tujuan 1 Indikator keterbacaan gender		KETUA DASAR
		Subsumber 1 Meningkatnya peran serta dan partisipasi perempuan dalam pembangunan			Indikator Subsumber 1 Terdapat partisipasi perempuan dalam pembangunan		KETUA DASAR
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan PUG Peningkatan dalam Pembangunan		Indikator Anggaran Regional Gender (AKG)	PROGRES PEMERINTAHAN GENDER DAN PERBANGUNAN GENDER	DOKUMEN
				Terdapatnya Kegiatan Peningkatan Peningkatan Gender (PUG) dan Lingkungan Peningkatan Kualitas Hidup	Indikator Program PUG PUG Peningkatan Gender yang telah dilaksanakan (Materi, Metode dan lain-lain) Peningkatan (%)	Peningkatan Peningkatan Gender (PUG) pada Lingkungan Peningkatan Peningkatan Kualitas Hidup	
				Terdapatnya Kegiatan Peningkatan Peningkatan PUG Peningkatan AKI/KKI	Jumlah orang yang telah menerima dan mendukung PUG Peningkatan	Koordinasi dan Sinergi Peningkatan PUG Kegiatan Peningkatan	
				Terdapatnya Peningkatan Peningkatan PUG Peningkatan Kegiatan PUG	Jumlah PUG Peningkatan yang telah menerima pendampingan (Jumlah)	Peningkatan Peningkatan PUG Kegiatan Peningkatan	
				Terdapatnya Bentuk Peningkatan PUG Kegiatan PUG	Jumlah PUG Peningkatan yang telah menerima Bentuk Peningkatan	Peningkatan Peningkatan PUG Kegiatan Peningkatan	
				Terdapatnya Kegiatan Peningkatan PUG Kegiatan PUG	Jumlah kegiatan Peningkatan PUG di lingkup Peningkatan	Peningkatan Kegiatan Peningkatan PUG Kegiatan Peningkatan	

				Jumlah tenaga sukarela/ relawan dalam Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Komunitas Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Persentase Organisasi Perempuan di Kota Penggal Positif yang Mendukung Advokasi (%)	Persentase Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kabupaten Kota	
				Teknis survey Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Penguatan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penguatan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten Kota (Laporan)	Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Penguatan Perempuan Kewarganegaraan Kabupaten Kota	
				Teknis survey Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten Kota yang mendukung advokasi (Lemba)	Advokasi Penguatan Perempuan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewarganegaraan Kabupaten Kota	
		Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi penganggaran			Indikator Sasaran 2 Indeks pemberdayaan gender (IDG)		KEPALA DPPAKB
			Meningkatnya Penguatan Data Gender dan Anak		Tingkat Penguatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan	PROGRAM PENGUATAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	BIDANG PPPA
				Teknis survey Kapasitas Penganggaran, Pengelolaan Anggaran dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Penguatan Teknis survey Penganggaran, Pengelolaan Anggaran dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Penganggaran, Pengelolaan Anggaran dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelengkapan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
				Meningkatnya Keterkaitan Data Gender dan Anak Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Terjadi (Dokumen)	Pengadaan, Penyajian, dan Penguatan Data Gender dan Anak Kabupaten Kota	
		Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi penganggaran			Indikator Sasaran 3 Perilaku Kewarganegaraan Terhadap Perempuan		KEPALA DPPAKB
			Meningkatnya Kewarganegaraan Terhadap Perempuan		Persentase Perempuan Kewarganegaraan dan TPPD yang mendapatkan Layanan Kewarganegaraan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	BIDANG PPA/PTD PPK
				Teknis survey Kapasitas Pencegahan Kewarganegaraan Terhadap Perempuan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendukung Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan RPT dan TPPD (%)	Pencegahan Kewarganegaraan Terhadap Perempuan Daerah Kabupaten Kota	
				Teknis survey Advokasi dan sosialisasi pencegahan RPT kepada pemerintah, lembaga dan masyarakat sipil tingkat di tingkat masyarakat Desa Kabupaten Kota	Jumlah pengantar kebijakan dan pemerintah kecamatan yang mendukung Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan RPT Tingkat Provinsi, Masyarakat, serta Kabupaten (Lemba)	Advokasi dan sosialisasi pencegahan RPT dan TPPD kepada pemerintah, lembaga dan masyarakat sipil tingkat Kewarganegaraan Kabupaten Kota	
				Teknis survey kerjasama para pihak dalam pencegahan RPT Kewarganegaraan Kabupaten Kota	Jumlah kerjasama para pihak dalam pencegahan RPT Kewarganegaraan Kabupaten Kota (Dokumen)	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan RPT Kewarganegaraan Kabupaten Kota	

				Terdapatnya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terealisasi	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya layanan pendampingan teraga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pengakuan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan pendampingan teraga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Layanan Pengakuan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengakuan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Sekelompok)	Layanan Pengakuan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya layanan mediasi legal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengakuan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Sekelompok)	Layanan Mediasi legal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Layanan Kesehatan yang Tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan Sumber pendanaan Lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan pengakuan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	Layanan Kesehatan yang Tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan Sumber pendanaan Lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyasar Organisasi Lembaga Komunitas Yang Bergeak Dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Pelatihan (Dengan Satuan Ts)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Berek (Orang)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terdapatnya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) (Lembaga)	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

				Terdapat layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Pengajuan Tingkat Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Layanan gilek bebas bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gilek bebas bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan gilek bebas bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Terdapat layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pengaduan atau pengajuan bagi Tingkat Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Terdapat layanan rumah pendamping bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah pendamping bagi perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan rumah pendamping bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Terdapat Layanan apasit untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan apasit untuk Perempuan Korban Tingkat Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan apasit untuk Pemulihan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Terdapat Layanan Kustodian yang Tidak di Jamin BPJS, Jember, dan Sumber pendanaan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pengaduan atau Pengajuan Tingkat Kabupaten Kota (Daerah)	Layanan Kustodian yang Tidak di Jamin BPJS, Jember, dan Sumber pendanaan Layanan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten Kota	
				Terdapatnya Kegiatan Penerimaan Korban Terdapat Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	Penerimaan SDN yang meliputi Kustodian dan Pendampingan dalam kabupaten Kabupaten (Provinsi) dengan Penerimaan KTR (Daerah, Jawa, N)	Penerimaan Korban Tingkat Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	
				Terdapatnya Adhikar dan evaluasi pengaduan KA harus pengaduan kabupaten dan provinsi kabupaten di tingkat Kabupaten Kota	Jumlah pengaduan kabupaten dan provinsi kabupaten yang pengaduan kabupaten dan provinsi kabupaten di tingkat Kabupaten Kota (Kabupaten)	Adhikar dan evaluasi Penerimaan KA Evaluasi Pengaduan Kabupaten dan Provinsi Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota	
				Terdapatnya monitoring evaluasi dan pelaporan Kabupaten Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerimaan KA Kabupaten Kota (Kabupaten)	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam Penerimaan KA Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota	
				Terdapatnya Kegiatan Penerimaan dan Pengembangan Lembaga Persepsi Layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	Penerimaan Lembaga Penerimaan Layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	Penerimaan dan Pengembangan Lembaga Persepsi Layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	
				Terdapatnya Adhikar dan evaluasi Penerimaan dan pengembangan lembaga persepsi layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Penerimaan Layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota (Kabupaten)	Adhikar dan evaluasi Penerimaan dan pengembangan lembaga persepsi layanan bagi Anak yang Malakali dan (TWA) Lintas Daerah Kabupaten Kota	

	Tujuan Utama Memperkuat Kesehatan Gerdas, Partisipasi Anak, Kualitas Keluarga dan Memperkuat Pembangunan Masyarakat serta Meningkatkan Efektivitas Program Terkait Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Keluarga				Indikator Tujuan 3 Indeks Pembangunan Keluarga		NEPALA DPR/KOR
		Subsistem 3 Meningkatkan Kesehatan keluarga dan pengelolaan jaringan pendukuk			Indikator Subsistem 1 Angka kelahiran total (TFR) Per WIS (15-49 tahun)		NEPALA DPR/KOR
			Tumbuhnya Partisipasi Juntas Pendukuk		Angka Kelahiran Rendah Usia 15-19 Tahun Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Program Pengelolaan Pendukuk	INDONESIA
				Terkait dengan Kegiatan Pemetaan dan Berkoordinasi Keluhan Pemetaan Daerah Program dengan Pemetaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Pendukuk	Pemetaan Terpadunya Layanan Pemetaan dan Berkoordinasi Keluhan Pemetaan Daerah Program dengan Pemetaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Pendukuk	Pemetaan dan Berkoordinasi Keluhan Pemetaan Daerah Program dengan Pemetaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Pendukuk	
				Terkait dengan Dapur Pengendalian Program Berbasis Komunitas (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Layanan Dapur Pengendalian Program Berbasis Komunitas (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kecamatan)	Pelaksanaan Dapur Pengendalian Program Berbasis Komunitas	
				Terkait dengan Pelayanan Gerdas Desain Pengembangan Kependudukan (SDPR) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Pembinaan Gerdas Desain Pengembangan Kependudukan (SDPR) Tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Pembinaan Gerdas Desain Pengembangan Kependudukan (SDPR) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terkait dengan Fasilitas, Berkoordinasi dan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan non Formal dan Jalur SD/MI dan SLTP/MTS serta Jalur non Formal dan Informal	Jumlah Dokumen Alokasi, Berkoordinasi dan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan non Formal dan Jalur SD/MI dan SLTP/MTS serta Jalur non Formal dan Informal (Kabupaten/Kota)	Alokasi, Berkoordinasi dan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal dan non Formal dan Jalur SD/MI dan SLTP/MTS serta Jalur non Formal dan Informal Pendidikan	
				Terkait dengan Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Pendukuk dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Terpadunya Layanan Pemetaan dan Pembinaan Pengendalian Pendukuk dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan dan Pembinaan Pengendalian Pendukuk dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkait dengan Pemetaan dan Pengelolaan Data Keluarga	Jumlah Layanan Pemetaan dan Pengelolaan Data Keluarga (Layanan)	Pemetaan dan Pengelolaan Data Keluarga	
				Terkait dengan Pengelolaan dan Pelayanan Data Pengendalian Layanan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelayanan Data Pengendalian Layanan dan Pelayanan KB (Dokumen)	Pengelolaan dan Pelayanan Data Pengendalian Layanan dan Pelayanan KB	
				Operasinya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk Monev Integral Program Berbasis Komunitas (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang terkait (DPR)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk Monev Integral Program Berbasis Komunitas (Pengembangan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang terkait (DPR)	Pembinaan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Monev Integral Program Berbasis Komunitas di Sektor Lain	

			Meningkatnya Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Indikator Program 1 - Pembedayaan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi (Tidak Kritis)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Bidang IV
			Terkelompoknya Kegiatan Pembedayaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kelembagaan Budaya Lokal	Persentase Tersampainya Laporan Pembedayaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kelembagaan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kelembagaan Budaya Lokal	
			Terkelompoknya Operasionalisasi Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Operasionalisasi Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Pengelolaan Operasionalisasi Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
			Terkelompoknya Kegiatan Pembedayaan dan Pemupukan Peran Serta Organisasi Komunitas Lokal Tingkat Daerah, Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan dan Peningkatan Efektivitas Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Pembinaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Komunitas Lokal Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan dan Peningkatan Efektivitas Ber-KB	
			Tercapainya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) (Kampung)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Pembedayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana (KB)	Indikator Program 2 - Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (nCPM)		Bidang KB/K3
			Terkelompoknya Kegiatan Pengendalian dan pendampingan keluarga dalam pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemakaian KB Ber-GPA Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian dan pendampingan pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Terkelompoknya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya (Laporan)	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya	
			Tercapainya Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Peningkatan Kesetiaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Terkelompoknya Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya (Laporan)	Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaring-jaring dan Jejaringnya	
			Terkelompoknya Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Pospartum	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tim Pendamping Keluarga dalam Melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Pospartum (Kegiatan)	Fasilitasi dan Peningkatan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Pospartum	

				Tertelusanya Laporan Pelaksanaan Tingkat Persepsi KB Pemasangan IUD RISBPUS	Pemasangan Injeksi Mencegah Pelebaran (MP) yang Berhasil Kapsul	Pemasangan Tampon Persepsi KB Pemasangan Lanset KB (PUSPUS)	
				Tertelusanya Pembinaan BPP dan Program Bunga Kelana (Pembinaan Keluarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana di Lini Lanset oleh RISBPUS)	Jumlah Organisasi yang Mengikut Pembinaan MP dan Program Bunga Kelana (Pembinaan Keluarga Kependidikan, dan Keluarga Berencana di Lini Lanset oleh RISBPUS (Organisasi)	Pembinaan MP dan Program Bunga Kelana di Lini Lanset oleh RISBPUS	
				Tertelusanya Pengawasan Kader Injeksi Kapsul Persepsi (KIP)	Jumlah Kader yang Mengikut Pengawasan Kader Injeksi Mencegah Pelebaran (KIP) (Orang)	Pengawasan Kader Injeksi Mencegah Pelebaran (KIP)	
		Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk			Indikator Sasaran 3 Pemerataan Pemukiman Keluarga Berencana Stunting		KEDAL DPPKUS
			Meningkatnya Peningkatan dan Pusat serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Pemerataan Keluarga yang Mengikut Kelompok Kegiatan Kesehatan Keluarga	PROGRAM PEMERIKHAAN DAN PENGUKURAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Salung KESKUS
				Tertelusanya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemerataan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemerataan Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terdapatnya dua organisasi bag kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Unita Peningkatan Pendidikan Keluarga Asesor (UPPA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Unita Peningkatan Pendidikan Keluarga Asesor (UPPA) yang mendapat bina operasional kegiatan (kelompok)	Penyediaan Bina Operasional Bag Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Unita Peningkatan Pendidikan Keluarga Asesor (UPPA)	
				Tertelusanya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Peningkatan Ekonomi Keluarga (UPPKS) Laporan)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS, KKR, KKL, PPKS, PKR, dan Unita Peningkatan Pendidikan Keluarga Asesor (UPPA)	
				Tertelusanya Pengelakan Kesehatan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelakan Kesehatan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan (Dokumentasi)	Pengelakan Kesehatan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Tertelusanya Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Pusat Data Organisasi Kesejahteraan Keluarga (KKS) dan Kesejahteraan Keluarga (KKS) dan Kesejahteraan Keluarga (KKS)	Pemerataan Keluarga Berencana Stunting yang Mendukung Peningkatan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Pemerataan dan Peningkatan Pusat Data Organisasi Kesejahteraan Keluarga (KKS) dan Kesejahteraan Keluarga (KKS) dan Kesejahteraan Keluarga (KKS)	
				Tertelusanya Pemasukan Data dan Informasi Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	Calon Pemasukan Data dan Informasi Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita) Laporan)	Pemasukan Data dan Informasi Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	
				Tertelusanya Peningkatan Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	Jumlah Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita) Laporan)	Peningkatan Keluarga Berencana Stunting (Termasuk nama Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	
				Tertelusanya Promosi dan Sosialisasi Program Peningkatan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Peningkatan Keluarga Laporan)	Promosi dan Sosialisasi Program Peningkatan Keluarga	

		Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk			Indikator Sasaran 3 Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera		KEPALA DPT/PAKB
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kecamatan		Persentase Fasilitas Tata kelola Kelurahan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	UDANG PM
				Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pemerintah Kelurahan dengan Himpun (Jali)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Evakuasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evakuasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	Fasilitas Evakuasi Perencanaan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pembangunan		Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	UDANG PM
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergejala di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembinaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perkotaan Hukum Adat yang Sama di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergejala di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perkotaan Hukum Adat yang Sama di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Diringkaskan Kapasitasnya (Lembaga)	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
				Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Sana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemanfaatan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Sana (Laporan)	Fasilitas Pemanfaatan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Sana	
				Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

Tujuan RPJMD 2 Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Berkeadilan, dan Tangguh					Indikator Tujuan 1 Rencana Strategis Daerah	KEMALAH DAERAH
Strategi RPJMD 2 Meningkatkan Akuntabilitas Berapa Pemerintah Daerah					Indikator Strategis 1 Capaian Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)	KEMALAH DAERAH
	Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Gender, Partisipasi Anak, Kualitas Keluarga dan Masyarakat Peningkatan Masyarakat serta Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Integritas				Indikator Tujuan 4 Hasil Tercapainya Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	KEMALAH DAERAH
		Strategi 4 Tercapainya Implementasi Kebijakan RPJMD secara Terintegrasi, Komprehensif dan Sistematis			Indikator Strategis 1 Persentase Penyelenggaraan Rencana Kerja Level Penyelenggara (RPT) Pemerintah Daerah	KEMALAH DAERAH
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, KEMENTERIAN
					Indikator 1 : Persentase ketercapaian dokumen perencanaan dan pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Tercapainya Laporan Kinerja Penyelenggara, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Laporan Penyelenggara, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Laporan Penyelenggara, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
				Tercapainya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
				Tercapainya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD
				Tercapainya Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD
				Tercapainya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen DPA-SKPD
				Tercapainya Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan DPA-SKPD
				Tercapainya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD
				Tercapainya Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah

			Meningkatnya 120 KWh dan Jumlah Pemasangan listrik di desa	Indikator 2. Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan keagenan peternakan		
			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Peningkat Desa	Pencapaian Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Peningkat Desa Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Peningkat Desa	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Yang Menentu Gaji dan Tunjangan ASN	Pengeduan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Akhir Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Pencapaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Bulan Triwulan Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Pencapaian Laporan Keuangan Bulan Triwulan Semester SKPD	Koordinasi dan Pencapaian Laporan Keuangan Bulan Triwulan Semester SKPD	
			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Pengeduan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	
			Tersedianya Laporan Administrasi Keperawatan Peningkat Desa	Pencapaian Tersedianya Laporan Administrasi Keperawatan Peningkat Desa Tepat Waktu	Administrasi Keperawatan Peningkat Desa	
			Tersedianya Pakan Dink Bakti Airbur Kampungannya	Jumlah Paket Pakan Dink Bakti Airbur Kampungannya	Pengeduan Pakan Dink Bakti Airbur Kampungannya	
			Tersedianya Laporan Administrasi Usah Peningkat Desa	Pencapaian Tersedianya Laporan Administrasi Usah Peningkat Desa Tepat Waktu	Administrasi Usah Peningkat Desa	
			Tersedianya Koneksi Instalasi Listrik Peningkat Bangunan Kantor	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik Peningkat Bangunan Kantor Yang Disediakan	Pengeduan Koneksi Instalasi Listrik Peningkat Bangunan Kantor	
			Tersedianya Pasokan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Paket Pasokan dan Perbaikan Kantor Yang Disediakan	Pengeduan Pasokan dan Perbaikan Kantor	
			Tersedianya Pasokan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pasokan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengeduan Pasokan Rumah Tangga	
			Tersedianya Pakan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pakan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengeduan Pakan Logistik Kantor	
			Tersedianya Besang Cetak dan Pengeduan	Jumlah Paket Besang Cetak dan Pengeduan yang Disediakan	Pengeduan Besang Cetak dan Pengeduan	
			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Laporan Pencapaian Jasa Pelayanan Usah Peningkat Desa	Pencapaian Tersedianya Laporan Pencapaian Jasa Pelayanan Usah Peningkat Desa Tepat Waktu	Pengeduan Jasa Pelayanan Usah Peningkat Desa	
			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pencapaian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pengeduan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Usah Kantor	Jumlah Laporan Pencapaian Jasa Pelayanan Usah Kantor yang Disediakan	Pengeduan Jasa Pelayanan Usah Kantor	

			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indikator 3 : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		
			Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah Tahun Wajar	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didisahkan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisahkan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisahkan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Didisahkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang didisahkan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
			Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah Tahun Wajar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peringkat Utama Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian program strategis Kota Pangkal Pinang yaitu :

“Program Kesejahteraan Sosial Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender”

Sedangkan untuk Program Prioritas yang mendukung Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkal Pinang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pembangunan		Lingkup Program : Optimalisasi Tim Penggerak PKK di Setiap Kecamatan
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Lingkup Program : Pemberdayaan Perempuan Berkelanjutan
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Lingkup Program : Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan		Lingkup Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyara- katan
			Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	ASTA CITA Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
ASTA CITA				
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Advokasi Dan Sosialisasi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak		

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdapat pada Tabel 4.3. berikut :

TABEL 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Kota Pangkal Pinang

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2020		2021		2022		2023		2024		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)	(XII)	(XIII)	(XIV)	(XV)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.213.304.717		8.573.369.953		9.002.668.450		9.227.735.162		9.458.428.541		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.215.869.717		5.998.224.953		6.239.123.450		6.419.190.162		6.614.883.541		
2.08.01	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.663.466.717		5.323.724.953		5.522.123.450		5.672.194.162		5.867.883.541		
	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Sekretaris
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan lingkungan perangkat daerah (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Sekretaris
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Sekretaris
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Perencana Ahli Muda
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Perencana Ahli Muda
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan Dokumen)				1		1		1		1		Perencana Ahli Muda
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Perencana Ahli Muda
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Perencanaan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi/Perencanaan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan Dokumen)				1		1		1		1		Perencana Ahli Muda
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Perencana Ahli Muda

KODE	SIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2026	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN										REKAMERAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tersedianya Dokumen Perubahan BKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan BKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan BKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan BKA-SKPD (Dengan Salinan Dokumen)				1		1		1		1		Revisi/Aktif Mada
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Perencanaan Aktif Mada
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Salinan Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Salinan Dokumen)				1		1		1		1		Revisi/Aktif Mada
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan BPA-SKPD				3		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Perencanaan Aktif Mada
	Tersedianya Dokumen Perubahan BPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan BPA-SKPD (Dengan Salinan Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan BPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan BPA-SKPD (Dengan Salinan Dokumen)				1		1		1		1		Revisi/Aktif Mada
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				3		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Perencanaan Aktif Mada
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Salinan Dokumen)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Salinan Dokumen)				1		1		1		1		Revisi/Aktif Mada
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Perencanaan Aktif Mada
	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Salinan Dokumen)				1		1		1		1		Revisi/Aktif Mada
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.427.286.937		5.520.000.000		5.620.000.000		5.720.000.000		5.520.000.000	
	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Salinan %)	100	100		100		100		100		100		Analisis Perencanaan Negara Aktif Mada
2.08.01.2.02.0001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.427.286.937		5.500.000.000		5.600.000.000		5.700.000.000		5.600.000.000	Analisis Perencanaan Negara Aktif Mada
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Salinan Pengeluaran)	20			30		30		30		30		Analisis Perencanaan Negara Aktif Mada
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Analisis Perencanaan Negara Aktif Mada
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Salinan Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Salinan Laporan)				1		1		1		1		Analisis Perencanaan Negara Aktif Mada

KODE	MIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
00	01	10	10	01	00	01	00	00	00	01	00	01	00	00
2.06.01.1.82.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	Analisis Perbendaharaan Negara ANI Mada
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD (Dengan Saluran Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD (Dengan Saluran Laporan)				12		12		12		12		Analisis Perbendaharaan Negara ANI Mada
2.06.01.1.82.0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Analisis Perbendaharaan Negara ANI Mada
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran (Dengan Saluran Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran (Dengan Saluran Dokumen)				5		5		5		5		Analisis Perbendaharaan Negara ANI Mada
2.06.01.1.85	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000	
	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan: %)	100	9		100		100		100		100		Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
2.06.01.1.85.0001	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000	Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Dengan Satuan: Paket)				1		1		1		1		Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
2.06.01.1.86	Administrasi Umum Perangkat Daerah				201.146.890		273.560.873		410.960.570		442.075.202		493.010.861	
	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan: %)	100	100		100		100		100		100		Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
2.06.01.1.86.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangkon Bangunan Kantor				11.900.000		21.344.000		26.616.000		31.110.000		36.324.000	Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pemangkon Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemangkon Bangunan Kantor yang Dibagikan (Dengan Satuan: Paket)			1		1		1		1		1	Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
2.06.01.1.86.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		55.000.000	Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibagikan (Dengan Satuan: Paket)				4		4		4		4		Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
2.06.01.1.86.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0.000.000		0.000.000		0.000.000		0.000.000	Keseluruhan Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Dibagikan (Dengan Satuan: Paket)				0		0		0		0		Keseluruhan Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2021	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2024		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
IS	IS	IS	IS	IS1	IS	IS1	IS	IS1	IS	IS1	IS	IS1	IS1	IS1
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.013.150		41.717.900		41.483.200		41.627.000		41.667.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribusikan (Dengan Satuan Paket)		1		1		1		1		1		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				11.076.630		46.090.000		14.480.000		14.195.000		71.850.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didistribusikan (Dengan Satuan Paket)		1		1		1		1		1		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				202.859.000		186.498.173		207.761.370		193.734.282		225.947.061	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Dengan Satuan Laporan)		4		4		4		4		4		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan				0		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan	Persentase Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Perseorangan (Dengan Satuan Persen)	0	0		100		100		100		100		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.07.0003	Pengadaan Mobil				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Mobil	Jumlah Unit Mobil yang Didistribusikan (Dengan Satuan Unit)				10		10		10		10		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Didistribusikan (Dengan Satuan Unit)				1		1		1		1		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan (Dengan Satuan Unit)				1		1		1		1		Keseluruhan Umur dan Kegunaan
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Umur dan Kegunaan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribusikan (Dengan Satuan Unit)				1		1		1		1		Keseluruhan Umur dan Kegunaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR/ OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
00	01	10	00	10	10	10	00	10	10	10	10	10	10	00
2.08.01.2.97.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		25.000.000		20.000.000		22.000.000		20.000.000	Kasubag Urusan dan Kepegawaian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibekalkan (Dengan Satuan Unit)				1		1		1		1		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.98	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				814.127.880		862.167.880		870.367.880		884.127.880		860.127.880	
	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.98.0002	Penyediaan Jasa Kemanisias, Sanitasi Daya Air dan Listrik				85.459.980		138.459.000		140.459.000		138.459.000		160.459.000	Kasubag Urusan dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Kemanisias, Sanitasi Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kemanisias, Sanitasi Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan (Dengan Satuan Laporan)		4		4		4		4		4		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.98.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor				729.728.880		729.728.880		729.728.880		729.728.880		729.728.880	Kasubag Urusan dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dibekalkan (Dengan Satuan Laporan)		4		4		4		4		4		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.855.000		124.877.000		101.423.000		374.327.000		466.277.000	
	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.99.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemilikan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				59.459.980		59.459.000		49.459.000		49.459.000		55.459.000	Kasubag Urusan dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemilikan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibekalkan dan Diberikan Pakainya (Dengan Satuan Unit)		1		1		1		1		1		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.99.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				72.487.990		125.100.000		117.800.000		127.500.000		145.593.000	Kasubag Urusan dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibekalkan dan Diberikan Pakainya (Dengan Satuan Unit)		5		5		5		5		5		Kasubag Urusan dan Kepegawaian
2.08.01.2.99.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				57.129.990		55.459.000		80.219.000		88.300.000		76.593.000	Kasubag Urusan dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PADU INDIKATIF TAHUN										KETURANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		
				TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	TARGET	PADU	
10	00	01	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	00
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki (Dengan Satuan/Dini)		80		120		140		160		180	Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Dengan Satuan/Dini)			1		1		1		1		Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Dengan Satuan/Dini)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Dengan Satuan/Dini)			1		1		1		1		Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Dengan Satuan/Dini)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi (Dengan Satuan/Dini)			1		1		1		1		Keseluruhan Urusan dan Kegiatan
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBINAAN PEREMPUAN				15.000.000		12.000.000		40.000.000		60.000.000		60.000.000	
	Hasilnya: Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Dengan Satuan/Persentasi)	1,48	3,6		3,7		3,8		3,8		4,0		Kabid Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01	Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				11.000.000		10.000.000		17.000.000		17.000.000		11.000.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Program PUG Pada Perangkat Daerah yang Sudah di Evaluasi Melalui Analisis Gender Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan%)	0	100		100		100		100		100		Analisis Kebijakan AHD Mada 1
2.08.02.2.02.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		17.000.000		0		10.000.000	Analisis Kebijakan AHD Mada 1
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Dengan Satuan/Laporan)	1					1				1		Analisis Kebijakan AHD Mada 1
2.08.02.2.02.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		10.000.000	Analisis Kebijakan AHD Mada 1
	Terlaksananya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Dengan Satuan/Kebijakan)										1		Analisis Kebijakan AHD Mada 1

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10	01	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10	00	10
2.08.02.1.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PGD Kewirausahaan Kabupaten/Kota				30.000.000		0		0		0		0	Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
	Tertindakanya pendampingan penyelenggaraan PGD kewirausahaan Kabupaten/Kota	jumlah OPD/kabupaten yang mendapatkan pendampingan (Dengan Saluran Lantai)		34										Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PGD Kewirausahaan Kabupaten/Kota				0		15.000.000		0		10.000.000		0	Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
	Tertindakanya bimbingan teknis penyelenggaraan PGD kewirausahaan Kabupaten/Kota	jumlah SPN OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimbingan (Dengan Saluran Orang)		34						34				Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat/Kelompok Kewirausahaan Kabupaten/Kota				0		17.500.000		25.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Tertindakanya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat/Kelompok Kewirausahaan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan di Kota Pangkal Pinang Yang Mendapatkan Advokasi (Dengan Saluran%)	0	0		75		77		70		75		Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
2.08.02.1.02.0005	Advokasi Pendidikan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewirausahaan Kabupaten/Kota				0		17.500.000		17.500.000		20.000.000		22.000.000	Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
	Tertindakanya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewirausahaan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Dengan Saluran Lantai/Orang)		39		30		30		30		30		Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
2.08.02.1.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewirausahaan Kabupaten/Kota				0		0		0.000.000		10.000.000		0.000.000	Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
	Tertindakanya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewirausahaan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewirausahaan Kabupaten/Kota (Dengan Saluran Laporan)						1		1		1		Analisis Kebijakan Abdi Mada 1
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				305.930.000		890.070.000		865.930.000		870.930.000		870.070.000	
	Memastikan Keamanan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Saluran%)	100	100		100		100		100		100		Kasus Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				71.500.000		79.000.000		81.500.000		86.000.000		86.500.000	
	Tertindakanya kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KIP dan TPPD (Dengan Saluran%)	0	30		50		70		75		80		Analisis Kebijakan Abdi Mada 2
2.08.03.1.01.0004	Kerjasama Para Pihak Dalam Pencegahan KIP Kewirausahaan Kabupaten/Kota				0		7.500.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000	Analisis Kebijakan Abdi Mada 2

KODE	NOMOR URUTAN PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tertindakanya Komunitas para pihak dalam menerapkan RP Keselamatan KabupatenKota	Jumlah Komunitas para pihak dalam menerapkan RP Keselamatan KabupatenKota (Dengan SaluranDarah)				2		3		2		3		Aspek Kebijakan RP1 Mada 2
2.08.01.3.01.0006	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan ZIF dan TPPD Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Keagamaan Kewenangan KabupatenKota				71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000		71.500.000	Aspek Kebijakan Aspek Mada 2
	Tertindakanya Advokasi dan sosialisasi pencegahan ZIF kepada pengambil kebijakan dan pemangku keagamaan di Tingkat kecamatan, kota kabupaten	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku keagamaan yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi pencegahan ZIF tingkat provinsi, masyarakat, serta kabupaten Kota (Dengan SaluranDarah)		20		20		20		20		20		Aspek Kebijakan RP1 Mada 2
2.08.01.3.02	Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan KabupatenKota				178.200.000		178.200.000		178.200.000		178.200.000		178.200.000	
	Tertindakanya Kegiatan Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan KabupatenKota	Pemerintah Perempuan Korban Kekerasan Yang Terpapar (Dengan Saluran/%)	100	100		100		100		100		100		Kepala UPTD PPA
2.08.01.3.02.0003	Layanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin BPJS, jarkesda, dan Sumber Pendanaan lainnya Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat KabupatenKota				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kepala UPTD PPA
	Tertindakanya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, jarkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi PerempuanKorban Kekerasan Tingkat KabupatenKota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengobatan dari Pengalokasian tingkat KabupatenKota (Dengan SaluranDarah)				2		2		2		2		Kepala UPTD PPA
2.08.01.3.02.0004	Layanan Gelas Cairin Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat KabupatenKota				19.700.000		19.700.000		19.700.000		19.700.000		19.700.000	Kepala UPTD PPA
	Tertindakanya layanan gelas cairin bagi Perempuan Korban kekerasan tingkat KabupatenKota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelas cairin bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatkota (Dengan SaluranDarah)		4		4		4		4		4		Kepala UPTD PPA
2.08.01.3.02.0005	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat KabupatenKota				19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000	Kepala UPTD PPA
	Tertindakanya layanan pendampingan tenaga ahli bagi PerempuanKorban Kekerasan Tingkat KabupatenKota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengobatan dari Pengalokasian bagi Tingkat KabupatenKota (Dengan Saluran Darah)		20		20		20		20		20		Kepala UPTD PPA
2.09.01.3.01.0006	Layanan Rumah Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat KabupatenKota				55.440.000		55.440.000		55.440.000		55.440.000		55.440.000	Kepala UPTD PPA
	Tertindakanya layanan rumah perlindungan bagi PerempuanKorban Kekerasan Tingkat KabupatenKota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan korban kekerasan tingkat KabupatenKota (Dengan Saluran Darah)		4		4		4		4		4		Kepala UPTD PPA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKTOR OUTCOME/OUTPUT	SABITIME 2024	TARGET DAN PAGU INISIASIIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.00.03.1.02.0007	Layanan Medislegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000	Kepala UPTD FPA
	Terdapatnya layanan medislegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Mengacu Saluran Darah)		10		10		10		10		10		Kepala UPTD FPA
1.00.03.1.02.0008	LayananPengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000	Kepala UPTD FPA
	Terdapatnya Layanan Pengaduan atau penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Mengacu Saluran Darah)		10		10		10		10		10		Kepala UPTD FPA
1.00.03.1.02.0009	Layanan Pendampingan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000		11.550.000	Kepala UPTD FPA
	Terdapatnya Layanan pendampingan korban bagi PerempuanKorban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Mengacu Saluran Darah)		10		10		10		10		10		Kepala UPTD FPA
1.00.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				86.196.000		81.690.000		104.190.000		106.196.000		106.190.000	
	Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi/Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Bidang Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembiayaan (Mengacu Saluran%)	6	50		50		60		70		75		Analisis Kebijakan AMI Mada 2
1.00.03.1.03.0001	Aktivasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3		3.000.000		14.000.000		10.000.000		10.000.000	Analisis Kebijakan AMI Mada 2
	Terdapatnya Aktivasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan sosialisasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan non pemerintah (Mengacu Saluran Darah)		8		7		9		10		12		Analisis Kebijakan AMI Mada 2
1.00.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				86.196.000		86.190.000		88.190.000		86.196.000		86.190.000	Analisis Kebijakan AMI Mada 2
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pelatihan (Mengacu Saluran Darah)		70		75		75		75		75		Analisis Kebijakan AMI Mada 2
1.00.03	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				3		13.000.000		13.000.000		15.000.000		14.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	05
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Strategi dan Pelaksanaan Kebijakan (Dengan Satuan%)	0	0		1		2		3		11		Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		14.000.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan%)	0	0		100		100		100		100		Analisis Kebijakan Ahli Muda 1
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				0		15.000.000		15.000.000		15.000.000		14.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda 1
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan Dokumen)				1		3		1		1		2025/1 Kebijakan Ahli Muda 1
2.08.06	PROGRAM PEMENJARAN HAK ANAK (PRA)				0		12.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000	
	Terpasangnya Standar Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Rumah Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Rumah Anak Sesuai Standar (Dengan Satuan%)	30	0		30		32		38		39		Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01	Pelaksanaan PHG pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kelembagaan Kabupaten/Kota				0		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan PHG pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Pemangku kepentingan yang telah mengikuti advokasi dan sosialisasi (Dengan Satuan%)	0	0		100		100		100		100		Analisis Kebijakan Ahli Muda 2
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kelembagaan Kabupaten/Kota				0		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda 2
	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemanfaatan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Lembaga)				20		22		28		29		Analisis Kebijakan Ahli Muda 2
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kelembagaan Kabupaten/Kota				0		7.500.000		15.000.000		16.000.000		10.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2024		2025		2026		2027		2028		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	05
	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SDM Lembaga Yang ikut Dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan%)	0	0		100		100		100		100		Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
3.06.06.2.02.005	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		7.500.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan (Dengan Satuan Orang)				0		0		0		0		Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
3.06.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				226.270.000		253.573.000		256.070.000		256.070.000		256.070.000	
	Memperkuatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perbudakan dan Pemaksaan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Katid Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.06.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				55.250.000		62.750.000		65.250.000		65.250.000		65.250.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDH Yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA (Dengan Satuan%)	0	100		100		100		100		100		Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
3.06.07.2.01.0007	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KIA Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				55.250.000		55.250.000		55.250.000		55.250.000		55.250.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lingkup Kabupaten/Kota	jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA lingkup Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Kegiatan)		5		5		5		5		5		Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
3.06.07.2.01.0008	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota				0		7.500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Laporan)				1		1		1		1		Analisis Kebijakan Ahli Muda 3
3.06.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				171.020.000		170.823.000		170.820.000		170.820.000		170.820.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2025		2027		2029		2031		2033		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Tertaksayanya Kegiatan Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertanggap (Dengan Satuan%)	0	100		100		100		100		100		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.680.000		10.680.000		10.680.000		10.680.000		10.680.000	Kepala UPTD PPA
	Terselangnya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		31		31		31		31		31		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0009	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				81.900.000		81.900.000		81.900.000		81.900.000		81.900.000	Kepala UPTD PPA
	Terselangnya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		47		47		47		47		47		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0010	Layanan Medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	Kepala UPTD PPA
	Terselangnya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		12		12		12		12		12		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0011	Layanan Gelar Kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				10.790.000		10.790.000		10.790.000		10.790.000		10.790.000	Kepala UPTD PPA
	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perampasan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		4		4		4		4		4		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0012	Layanan Rumah Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.440.000		5.440.000		5.440.000		5.440.000		5.440.000	Kepala UPTD PPA
	Terselangnya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perlindungan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		4		4		4		4		4		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0013	Layanan Pendampingan Korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				18.840.000		18.840.000		18.840.000		18.840.000		18.840.000	Kepala UPTD PPA
	Terselangnya layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban tingkat Kabupaten/Kota (Dengan SatuanOrang)		21		21		21		21		21		Kepala UPTD PPA
2.06.07.1.02.0014	Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS, Jemberda, dan Sumber Pendanaan Lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	Kepala UPTD PPA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
00	01	001	001	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
	Terdapatnya aparat kesehatan yang baik diarahkan IPS, jamkesmas, dan pusat pelayanan lainnya bagi Anak korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengobatan atau Pemantauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Orang)				2		2		2		2		Kepala UPTD PPA	
1.06.07.1.82.0010	Layanan Spesifik Untuk Pemulihan Korban Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				5.280.000		5.280.000		5.280.000		5.280.000		5.280.000	Kepala UPTD PPA	
	Terdapatnya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan Orang)		4		4		4		4		4		Kepala UPTD PPA	
1.06.07.1.82	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang telah mengikuti pelatihan dan sosialisasi (Dengan Satuan %)	0	0		100		100		100		100		Analisa Kebijakan Abdi Mada 1	
1.06.07.1.83.0011	Aksesual dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Analisa Kebijakan Abdi Mada 1	
	Terdapatnya Aksesual dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memberikan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tingkat Kabupaten/Kota yang memfasilitasi aksesual dan sosialisasi lembaga penyedia dan lain sebagainya (Dengan Satuan lembaga)				5		5		5		5		Analisa Kebijakan Abdi Mada 2	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				514.090.000		650.000.000		980.000.000		1.025.000.000		1.060.000.000		
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					0		20.000.000		35.000.000		43.000.000		43.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Fasilitas Taktik Kelola Kelurahan (Dengan Satuan %)	100	0		100		100		100		100		Kalaid Pemberdayaan Masyarakat	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				0		20.000.000		35.000.000		43.000.000		43.000.000		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Elemen Buk (Dengan Satuan %)	100	0		100		100		100		100		Pranata Hubungan Masyarakat Abdi Mada	
2.13.04.1.01.0010	Fasilitas Elemen Perkembangan Desa serta Lemba Desa dan Kelurahan				0		20.000.000		35.000.000		43.000.000		43.000.000	Pranata Hubungan Masyarakat Abdi Mada	
	Terlaksananya Fasilitas Elemen Pemerintahan Desa serta Lemba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Elemen Pemerintahan Desa serta Lemba Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan Kelurahan)				1		1		1		1		Pranata Hubungan Masyarakat Abdi Mada	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10	01	01	01	10	01	11	01	12	01	13	01	14	01	01
2.13.05	PROGRAM PEMBANGSAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				544.090.000		800.080.000		945.900.000		995.000.000		1.030.000.000	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Kabir - Pemberdayaan Masyarakat
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				514.090.000		800.080.000		945.900.000		995.000.000		1.030.000.000	
	Verifikasinya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) (Dengan Satuan%)	100	100		100		100		100		100		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1
2.13.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Pasyenda, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				28.150.500		50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Pasyenda, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Pasyenda, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan Lembaga)		113		110		113		110		113		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Penguatan Teknologi Tepat Guna				0		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Desa dalam Penguatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan Pemanfaatan Desa dalam Penguatan Teknologi Tepat Guna (Dengan Satuan Laporan)				1		1		1		1		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 2
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				485.000.000		755.080.000		870.000.000		900.000.000		930.000.000	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1
	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan Dokumen)		1		1		1		1		1		Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 1
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERSAMANA				1.483.345.000		1.725.745.000		1.783.545.000		1.783.545.000		1.783.545.000	
2.14.01	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				55.000.000		144.675.000		144.000.000		140.000.000		146.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2024		2025		2026		2027		2028		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10	01	10	14	15	00	17	18	19	00	20	00	22	04	00
	Yerkeselnya Peningkatan jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Rendah Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19 tahun) (Dengan Satuan:Kelahiran Per1000 WUS 15-19 Tahun)	15,10	14,14	21,7		10,0		18,7		18,7			Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerak
2.14.02.1.01	Pemoduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				0	43.875.000		60.892.000		60.896.000		60.896.000		
	Terlaksananya Kegiatan Pemoduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Terselenggaranya Laporan Penduduk dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Dengan Satuan:%)	0	0	100		100		100		100			Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
2.14.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (SDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0	5.002.000		10.993.000		10.996.000		10.996.000		Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
	Terlaksananya Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (SDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemantauan Grand Design Pembangunan Kependudukan (SDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)			1		1		1		1			Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan Rapor Pengendalian Program Bangsa Bangsa				0	16.875.000		25.893.000		25.896.000		25.896.000		Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
	Terlaksananya Rapor Pengendalian Program Bangsa Bangsa (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapor Pengendalian Program Bangsa Bangsa (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dengan Satuan:laporan)			1		1		1		1			Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
2.14.02.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pendidikan Kependudukan, jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, serta jalur Nonformal dan informal				0	22.203.000		25.893.000		25.896.000		25.896.000		Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
	Perkembangannya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pendidikan Kependudukan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, serta jalur Nonformal dan informal	Jumlah cakupan advokasi, sosialisasi dan Fasilitas Pendidikan Kependudukan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, serta jalur Nonformal dan informal (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)			10		10		10		10			Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				66.800.000	306.803.000		66.803.000		66.806.000		66.806.000		
	Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)	0	100	100		100		100		100			Pranata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Nusa

KODE	NIDANG/URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2025		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
2.14.02.2.02.0011	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000	Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
	Tertaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Daring dan Luring)		1		1		1		1		1		Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
2.14.02.2.02.0012	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Laju dan Pelayanan KB				40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000		40.800.000	Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
	Tertaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Laju dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Laju dan Pelayanan KB (Daring dan Luring)		1		1		1		1		1		Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
2.14.02.2.02.0013	Pembekalan dan Sosialisasi Kemitraan Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain				1		34.800.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
	Ukurlahya Kemitraan Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Peningkatan Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Sektor Lain)	Jumlah Kemitraan Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Peningkatan Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Sektor Lain yang Berbasis (Daring dan Luring))				18		21		24		22		Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
2.14.03	PROGRAM PEMAHAMAN KELUARGA BERENCANA (KB)				817.895.000		554.722.000		553.195.000		553.795.000		553.195.000	
	Merencanakan Pembudayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebiasaan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Dengan Satuan%)	5,37	10,3		16,2		16,1		18		15,9		Kabid KB, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
	Merencanakan Pembudayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembiayaan Keluarga Berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Modern Contraceptive (mCPR) (Dengan Satuan%)	71,34	81		62		63		64		65		Kabid KB, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Kamarkam, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				105.780.000		111.580.000		120.780.000		120.780.000		120.780.000	
	Tertaksananya Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Kamarkam, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Tertaksananya Laporan Pelaksanaan Advokasi, Kamarkam, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dengan Satuan%)	0	100		100		100		100		100		Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada
2.14.03.2.01.0018	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				105.780.000		111.580.000		120.780.000		120.780.000		120.780.000	Prasista Kependudukan Dan Keluarga Berencana Abdi Mada

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
	Terbentuknya Organisasi dan Sarana di Bala Penyelenggara Bangsa Berencana (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Lokasi Mark Pengadaan Operasional dan Sarana di Bala Penyelenggara Bangsa Berencana (Perencanaan, Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) (Dengan Selisih/kekurangan)		1		1		1		1		1		Walaupun Kelembagaan dan Keluarga Berencana ARI Mula
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pengasas Lapangan KB (PKB/PLKB)				15.550.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	
	Terbentuknya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Pengasas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang Mengikuti Kegiatan (Dengan Selisih/kekurangan)	0	100		100		100		100		100		Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)				15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
	Terbentuknya Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Dengan Selisih/kekurangan)		300		300		300		300		300		Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Berencana di Unit Lapangan oleh PKB/PLKB				10.000.000		0		0		0		0	Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
	Terbentuknya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Berencana (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) di Unit Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kelompok yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Berencana (Perencanaan Keluarga, Reproduksi, dan Keluarga Berencana) di Unit Lapangan oleh PKB/PLKB (Dengan Selisih/kekurangan)		10										Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kesehatan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				274.005.000		301.005.000		301.005.000		301.005.000		301.005.000	
	Terbentuknya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kesehatan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PKA) Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) (Dengan Selisih/kekurangan)	0	10,4		10,5		10,4		10,3		10,8		Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
2.14.03.2.03.0003	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringan				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
	Terbentuknya Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringan	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringan (Dengan Selisih/kekurangan)		1		1		1		1		1		Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Keselamatan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)				206.005.000		291.005.000		311.005.000		311.005.000		311.005.000	Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1
	Terdapatnya Peningkatan Keselamatan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Keselamatan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) (Dengan Selisih/kekurangan)		450		450		450		450		450		Penyuluh Keluarga Berencana ARI Mula 1

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT/OUTPUT	BASISLINE 2021	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda 1
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya (Dengan Satuan Laporan)				1		1		1		1		Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda 1
1.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pemberian Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Persalinan				0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda 1
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pemberian Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Persalinan (Dengan Satuan Kegiatan)	Jumlah kegiatan pendampingan Tim Pendamping Keluarga dalam pelayanan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Persalinan (Dengan Satuan Kegiatan)				1		1		1		1		Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda 1
1.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-EK				0		15.775.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-EK	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Dengan Satuan%)	0	57,34		65,93		66,43		71,43		71,43		Persentase Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
1.14.03.2.04.0008	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				0		15.775.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Persentase Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berkualitas di Kampung Keluarga Berkualitas)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berkualitas) (Dengan Satuan Kampung)				41		41		41		41		Persentase Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda
1.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				975.350.000		1.064.350.000		1.064.350.000		1.064.350.000		1.064.350.000	
	Hasil kegiatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Meningkatkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Kegiatan Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan%)	21,56	22		23,5		24		25,5		26		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.14.04.2.01	Pelaksanaan Penguatan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				15.750.000		60.350.000		100.750.000		100.750.000		100.750.000	
	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan%)	0	100		100		100		100		100		Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda 1

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2021	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
	Tertatasnya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah capaian hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Dengan Solusi/Laporan / Dokumen)				1		1		1		1		Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				0		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
	Tertatasnya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah capaian hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) (Dengan Solusi/Laporan / Dokumen)				1		1		1		1		Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
2.14.04.2.01.0021	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000		15.750.000	Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
	Tersedianya biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (KKK, BKR, BKL, PPKS, PK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Dengan Solusi/Laporan)		5		5		5		5		5		Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				983.400.000		983.400.000		983.400.000		983.400.000		983.400.000	
	Tertatasnya Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Beresiko Stunting Yang Mendapatkan Pendampingan dan Pemantauan (Dengan Solusi/Laporan)	4	85,80		85,80		86		86,28		86,40		Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
2.14.04.2.02.0085	Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)				43.800.000		43.800.000		43.800.000		43.800.000		43.800.000	Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2
	Tertatasnya Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita)	Cakupan Pemanfaatan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca melahirkan, Balita/Balita) (Dengan Solusi/Laporan)		1		1		1		1		1		Penyaluh Keluarga Berencana Ahli Muda 2

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
				2024		2025		2026		2027		2028		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduka/Balita)				919.990.000		919.990.000		919.990.000		919.990.000		919.990.000	Penguluh Keluarga Beresdasa AHI Mada 2
	Terdapatnya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduka/Balita) yang mendapat pendampingan (Dengan Saluran Laktasi)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduka/Balita) yang mendapat pendampingan (Dengan Saluran Laktasi)		1		1		1		1		1		Penguluh Keluarga Beresdasa AHI Mada 2
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				0		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Penguluh Keluarga Beresdasa AHI Mada 2
	Terdapatnya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Dengan Saluran Laktasi)				1		1		1		1		Penguluh Keluarga Beresdasa AHI Mada 2
			TOTAL		1.219.994.717		8.571.969.553		9.902.668.450		8.227.725.162		9.458.430.561	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkal Pinang

INDIKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indikator Tujuan Dinas (1) Indeks ketimpangan gender	Indeks/ Poin	0,229*	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	
Indikator Sasaran 1 Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	65,50	65,60	65,72	65,84	65,96	66,08	
Indikator Sasaran 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	
Indikator Sasaran 3 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	0,048*	0,046	0,045	0,043	0,041	0,039	
Indikator Tujuan Dinas (2) Indeks perlindungan anak	Indeks	67,70	67,75	67,80	67,85	67,90	67,95	
Indikator Sasaran 1 Predikat Kota Layak Anak	Predikat	501(Pratama)*	550 (Pratama)	600 (Pratama)	610 (Madya)	620 (Madya)	640 (Madya)	
Indikator Tujuan Dinas (3) Indeks pembangunan keluarga	Indeks/ Poin	73,5*	74	74,5	75	75,5	76	
Indikator Sasaran 1 Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49 tahun)	Rata-Rata Anak Per Wanita	2,18*	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
Indikator Sasaran 2 Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting	Persen	0,13*	2	2	2	2	2	

Indikator Sasaran 3 Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen	100*	100	100	100	100	100	
Indikator Tujuan Dinas (4) Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah	Level	3*	3	3	3	3	3	
Indikator Sasaran 1 Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RPT) Perangkat Daerah	Persen	100*	100	100	100	100	100	

Note: *Realisasi 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks/ Poin	73,5*	74	74,5	75	75,5	76	
2.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks/ Poin	0,229*	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	

Note: *Realisasi 2025

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkal Pinang

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen (%)	100*	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen (%)	100*	100	100	100	100	100	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Persen (%)	109*	108,5	108	107,5	107	106,5	
2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen (%)	60,5*	61	62	63	64	65	
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen (%)	216,36*	215,04	213,72	212,40	211,08	209,76	

Note: *Realisasi 2025

Tabel 4.7
Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan

NO	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak Per Wanita	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	73,5	74	74,5	75	75,5	76	
3.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks (Skala 0-100)	66,6	67,6	68,5	69,4	70,3	70,3	
4.	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Persen (%)	78,18	79,24	79,93	80,62	81,29	81,29	
5.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen (%)	5,98	3,71	3,65	3,62	3,61	3,61	
6.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun/ Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	27,4	24,14	21,7	20,0	18,7	18,7	
7.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks (Skala 0-100)	89,6	90,34	91,1	91,7	92,4	92,4	
8.	Indeks Lansia Berdaya	Indeks (Skala 0-100)	68,87	71,81	74,31	76,52	78,40	78,40	
9.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen (%)	52,38	57,14	61,90	66,67	71,43	71,43	
10.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67,70	67,75	67,80	67,85	67,90	67,95	
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen (%)	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Pangkal Pinang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkal Pinang 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Permasalahan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian secara efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029 ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Kerjasama dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan nilai tambah yang nyata terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah.